

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara fundamental esensi pembangunan ekonomi terletak di pencapaian pertumbuhan signifikan serta mengurangi kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, dan pengangguran, menyediakan pendapatan melalui peluang kerja untuk memenuhi kebutuhan publik, dan hasil pembangunan harus dibagi secara merata oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan; Namun, karena kebijakan pembangunan dibatasi oleh sumber daya yang ada, maka terjadilah ketimpangan pembangunan antar wilayah (Todaro dan Smith, 2006); Dari sudut pandang fenomenologi, ketimpangan terjadi di negara berkembang dan negara maju, dan distribusi pendapatan yang tidak merata menjadi masalah utama negara berkembang seperti Indonesia. Distribusi pendapatan ini dapat dibagi menjadi distribusi pendapatan relatif dan distribusi pendapatan absolut (Prawoto and Cahyani 2020).

Masalah ini dapat diminimalkan hingga batas yang dapat diterima oleh masyarakat (Fattah et al. 2022). Distribusi pendapatan yang tidak merata merupakan penyebab utama ketimpangan (Rachmawatie 2021). Dalam mengatasi masalah ini, pembangunan dan pertumbuhan harus mempertimbangkan dampak ekonomi mengenai kehidupan sosial, tingkat perkembangan sosial, serta lingkungan. Pertumbuhan ekonomi tidak lepas dianggap sebagai indikator pembangunan, realitanya masih ada kontradiksi

antara fokus pada pertumbuhan dan pengurangan kesenjangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan.

Ketimpangan terus terjadi Apabila terus terjadinya kelompok berpenghasilan rendah dengan kelompok berpenghasilan yang tinggi, yang menyebabkan kemiskinan. Ketimpangan distribusi pendapatan, yang terkadang disebut sebagai kesenjangan pendapatan, adalah indikator yang mengukur tingkat distribusi pendapatan di suatu daerah atau masyarakat dalam periode tertentu. Di berbagai tempat, fenomena kesenjangan pendapatan yang semakin melebar dapat dilihat wilayah di Indonesia serta di tingkat nasional, perkotaan, dan pedesaan. Di perkotaan, terutama kota-kota besar, terdapat ketimpangan yang tinggi antara penduduk kaya dan miskin (Khoirudin and Dahlan 2020). Pembangunan nasional telah mengurangi tingkat kemiskinan secara agregat, namun pengurangan tersebut belum merata. Wilayah pedesaan masih menghadapi kemiskinan yang jauh lebih tinggi dibanding perkotaan. Selain itu, laju penurunan kemiskinan di daerah pedesaan cenderung lebih lambat dibandingkan di daerah perkotaan (Warda et al. 2019).

Menurut Sjafrizal (2018), terdapat enam faktor utama yang menentukan ketimpangan pembangunan daerah, yaitu tingkat pembangunan ekonomi, migrasi internal dan antardaerah, mobilitas investasi, ketersediaan infrastruktur, serta perbedaan kualitas tenaga kerja dan kekayaan alam. Dengan demikian, pemerintah harus berupaya meningkatkan investasi, membangun infrastruktur yang lebih baik, memastikan pembangunan yang berimbang, meningkatkan

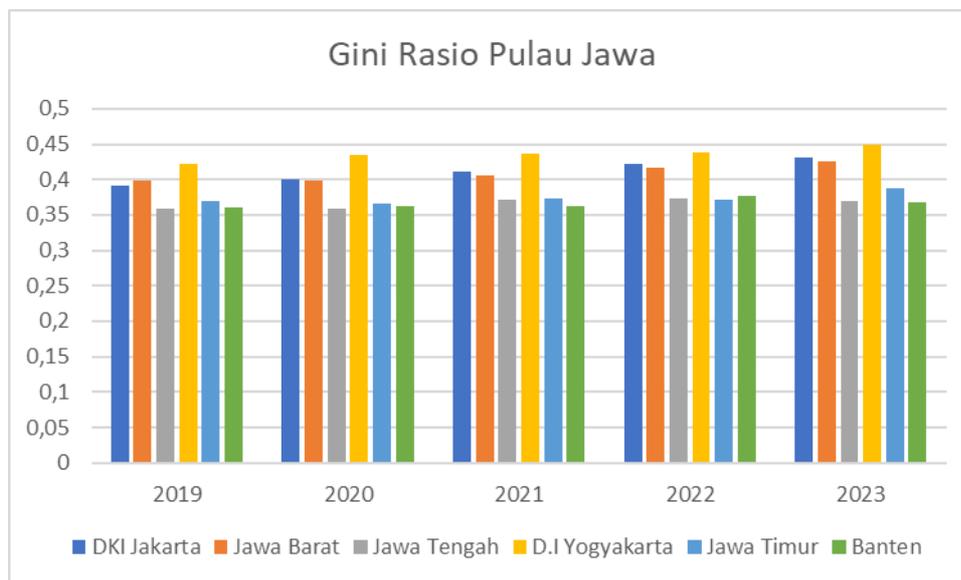
kuantitas serta kualitas pendidikan, dan mengoptimalkan manfaat sumber daya alam di seluruh wilayah.

Misalnya, ada kesenjangan di antara para petani. Petani yang memiliki lebih banyak lahan maka memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Sementara itu, petani kecil berjuang untuk mengelola lahan dengan hasil yang tetap sedikit. Khususnya petani yang tidak memiliki lahan, terpaksa bergantung pada keuntungan dari lahan pertanian yang luas. Demikian pula, sebagian besar petani kecil sekarang tidak memiliki keterampilan dan pendidikan yang tinggi, sehingga membatasi peluang untuk beralih ke bidang non-pertanian.. Akibatnya, beberapa negara berkembang tidak memperoleh manfaat dari proses pembangunan saat ini dan di masa mendatang. Meskipun Kesetaraan penuh sulit dicapai. Namun, kebijakan publik diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendapatan antar wilayah. Membuat pembangunan lebih adil (Syarif and Anggraini 2023).

Koefisien Gini mencerminkan ketimpangan distribusi pendapatan. Ini hanyalah salah satu dari beberapa tujuan pertumbuhan yang perlu dipenuhi. Pemerintah Indonesia telah menetapkan hal ini dalam Undang-Undang APBN tiap tahun (Aditya 2020). Koefisien Gini digunakan untuk mengetahui derajat ketimpangan distribusi pendapatan. Model ini menunjukkan bahwa pendapatan didistribusikan secara tidak merata dalam populasi. Semakin tidak meratanya distribusi pendapatan, semakin tinggi koefisien Gini, dan sebaliknya. Terlepas perbedaan pendapatan Jawa Timur adalah provinsi Indonesia yang terdiri dari 38 kabupaten/kota dan berperan sebagai kontributor terbesar kedua dalam

perekonomian Indonesia maupun Pulau Jawa. Meskipun situasi ekonominya terlihat baik dari segi kontribusi terhadap PDRB di Indonesia, jumlah penduduk miskin di provinsi ini tetap tertinggi secara nasional mencapai hingga 4,18 juta pada tahun 2023 menandakan distribusi pendapatan yang tidak merata.

Gambar 1.1 Gini Rasio Pulau Jawa Timur Tahun 2019-2023



Sumber: BPS 2024

Grafik nilai koefisien gini ratio pada 5 tahun terakhir secara keseluruhan provinsi-provinsi di pulau Jawa. Ketimpangan tiap tahunnya menunjukkan tren yang fluktuatif namun tetap dalam kategori ketimpangan sedang. Data menunjukkan bahwa meskipun D.I Yogyakarta selalu mencatat angka ketimpangan tertinggi selama periode tersebut, Jawa Timur berada di posisi nomor 4 tertinggi ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa, yang menunjukkan posisi menengah di antara provinsi-provinsi di Jawa. Jawa Timur mengalami kenaikan ketimpangan dari tahun 2021 ke 2023, yang berbeda dengan beberapa provinsi lain. Meski berada di posisi ke-4, dengan ukuran ekonomi yang besar dan beragam, ini

menjadi pertanyaan mengapa pembagian pendapatan tidak lebih merata di Jawa Timur. Koefisien Gini adalah indikator yang mengukur tingkat ketidaksetaraan suatu wilayah, berkisar antara 0 hingga 1. Para ekonom berpendapat bahwa koefisien Gini ketidaksetaraan dapat dikategorikan sebagai rendah ketika nilainya berada antara 0,4 hingga 0,5 sedangkan jika melebihi 0,5 nilai tersebut menunjukkan sebagai ketidaksetaraan parah (Rachmawatie 2021). Hal ini dapat dilihat koefisien Gini yang secara konsisten berada di atas 0,3 menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah belum cukup efektif dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Kondisi ini dipengaruhi oleh urbanisasi tanpa pengembangan keterampilan, yang disebabkan pengangguran dan kemiskinan terutama antara perkotaan dan pedesaan.

Perekonomian Jawa Timur mayoritas penduduk bekerja di bidang pertanian. Meskipun sektor ini menampung lebih banyak pekerja dari pada sektor industri kontribusi terhadap PDB per kapita lebih kecil sehingga menyebabkan ketidakseimbangan struktur ekonomi (BPS 2024). Penurunan pendapatan per kapita serta kebijakan pemerataan pendapatan akibat kondisi Pandemi Covid-19. Selain itu, pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan PDB per kapita di provinsi tersebut. Hal ini ditunjukkan dari peningkatan gini ratio yang mencapai 0,387 pada tahun 2023, angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Beberapa daerah mengalami pertumbuhan PDRB yang cukup pesat contoh yang dapat diambil adalah Kota Surabaya, Kota Malang, Sidoarjo, dan Gresik, yang memiliki PDRB yang cukup pesat karena menjadi pusat kegiatan di berbagai sektor perekonomian. Sementara itu, untuk wilayah kabupaten seperti Kabupaten Sampang, Kabupaten

Pamekasan, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Pacitan, PDRB-nya masih rendah akibat tingkat produksi perekonomian yang belum optimal (BPS, 2024).

Pemerintah harus segera mengatasi masalah ketimpangan distribusi pendapatan. Relevan tujuan desentralisasi fiskal ditunjukkan melalui upaya pemerintah dalam memperkecil ketimpangan antar daerah terhadap distribusi pendapatan. Sejak 1999, Indonesia menerapkan desentralisasi fiskal dengan adanya regulasi undang-undang nomor 22 dan nomor 25 mengenai pemerintah daerah serta alokasi dana terhadap pemerintah pusat serta daerah, telah disepakat model baru untuk desentralisasi keuangan dan otonomi daerah. Menurut (Digidowiseiso et al. 2022) negara dengan institusi yang kuat dan transparan lebih berhasil dalam mengelola sumber daya secara adil, dan keberagaman otoritas fiskal dapat mendorong peningkatan kualitas layanan.

Sejak 1 Januari 2001, di Indonesia pemberlakuan desentralisasi fiskal diikuti dengan konsekuensi yang luas, dimana wewenang pengelolaan, perencanaan, dan pelaksanaan APBD diterima oleh masing-masing pemerintah daerah, serta dilengkapi dengan diterimanya wewenang pengelolaan sumber penerimaan daerah yang mencakup basis pajak dan transfer dana sesuai mekanisme *money follows function* (Farida, Nur, Suman, Agus & Sakti 2021). Melalui desentralisasi fiskal, daerah tertinggal diharapkan dapat mengembangkan ekonomi lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat (Almuazam and Sirait 2020). Teori Tiebout (1956) menyatakan pemerintah daerah lebih memahami karakteristik dan kebutuhan masyarakatnya, sehingga dapat memberikan layanan publik lebih efektif. Desentralisasi bukan sekadar transfer kewenangan, tapi transformasi sistem

pemerintahan menjadi lebih responsif melalui birokrasi yang lebih sederhana dan pengambilan keputusan yang dinamis.

Menurut (Zhang and Zou 2001) secara umum tumbuh secara alami seiring berjalannya waktu. Namun, kebijakan desentralisasi fiskal dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kebijakan bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi sektor publik. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal bermula dari pertumbuhan sebagai tujuan, terdapat efisiensi yang tinggi dalam alokasi sumber daya publik, terdapat tujuan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan pendapatan per kapita, dan salah satu indikator langsung untuk mengukur kondisi ekonomi adalah pendapatan per kapita.

Mengenai Desentralisasi fiskal selama lima tahun terakhir, telah terjadi perbedaan daerah yang jelas di wilayah Jawa Timur. Kota Surabaya secara konsisten memiliki nilai desentralisasi fiskal tertinggi, yaitu diatas 56%, diikuti oleh Kota Malang, Kabupaten Sidoarjo dan Gresik dengan nilai sekitar 31-41%. Meskipun demikian, sebagian besar kota dan daerah di pemerintahan wilayah jawa timur masih mengandalkan pajak, dan alokasi belanja modal tidak merata di daerah dengan tingkat alokasi rendah sebagai contoh daerah Kabupaten Sampang mencatat nilai terendah, yaitu di bawah 15%. Pola ini menunjukkan ketergantungan fiskal mandiri bahwa daerah perkotaan mengandalkan sektor pendidikan serta pariwisata dan kawasan industri memiliki kemandirian keuangan yang lebih efektif dibandingkan dengan kabupaten yang lebih rural. Kesenjangan ini menandakan perlunya upaya untuk meratakan pembangunan dan memperkuat kapasitas pengelolaan keuangan di daerah-daerah dengan nilai desentralisasi fiskal yang

rendah. Adanya kebebasan otonomi yang diberikan cenderung membuat Pemerintah Daerah bergantung pada pemerintah pusat. Hal itu juga terjadi di Indonesia, lebih khususnya ketergantungan fiskal setiap daerah terhadap pemerintah pusat (Enemi dkk., 2019).

Pertumbuhan ekonomi adalah faktor kunci dalam kemajuan suatu negara. Menurut (Sukirno 2006), Perkembangan ekonomi di wilayah merupakan indikator keberhasilan perekonomian terhadap wilayah. Perekonomian pada wilayah tumbuh dari tahun ke tahun karena adanya peningkatan faktor-faktor produksi. Berbagai upaya pembangunan ekonomi Sebuah negara mengambil langkah-langkah untuk mendorong perkembangan kegiatannya dan meningkatkan standar hidup warganya. Penjelasan ini berpendapat bahwa pembangunan ekonomi biasanya didefinisikan oleh para ekonom sebagai sebuah proses yang bertujuan untuk memperbaiki kerangka institusi negara dan akhirnya meningkatkan pendapatan riil per kapita (Arsyad, dalam Mallarangang, 2018).

Mengenai pendapatan dan kesejahteraan Jawa Timur mengalami fluktuasi antara tahun 2019 dan 2023, Pada tahun 2019, PDRB Jawa Timur mencapai Rp. 1.649.895,64 Miliar. Namun, akibat Perubahan karena pandemi COVID-19 terhadap kegiatan ekonomi di seluruh bidang, maka mengalami penurunan menjadi Rp. 1.611.507,78 Miliar pada tahun 2020. Memasuki tahun 2021, terjadi pemulihan ekonomi dengan PDRB mencapai sekitar Rp.1.689.882,45 Miliar seiring dengan adaptasi kebiasaan baru dan pelonggaran pembatasan sosial. Pada tahun 2022 dan 2023 pertumbuhan ekonomi semakin membaik didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi pasca pandemi sehingga pemulihan ekonomi semakin kuat di Jawa Timur.

Perbedaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) antara daerah dan kota menyebabkan ketimpangan. Hal ini juga tercermin dari distribusi pendapatan yang tidak merata di beberapa kabupaten dan kota. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Konsentrasi aktivitas Ekonomi: Ketimpangan antardaerah disebabkan oleh konsentrasi tinggi kegiatan ekonomi di daerah tertentu.
2. Penanaman Modal (*Investment*) dan Perkembangan Ekonomi: Rendahnya sebuah daerah dengan pertumbuhan ekonomi Berkinerja lamban secara ekonomi dan memiliki pendapatan per kapita rendah disebabkan oleh investasi seperti yang ditunjukkan oleh teori Harrod dan pertumbuhan Domar.
3. Mobilitas atau Pergerakan Faktor Produksi: Ketimpangan ekonomi berkontribusi pada rendahnya pergerakan faktor produksi seperti pekerja dan investasi antar wilayah yang dapat dijelaskan melalui mekanisme pasar.
4. Perbedaan sumber kekayaan alam: daerah Wilayah yang kaya alam sering mengalami posisi yang menguntungkan tetapi juga memerlukan pengembangan teknologi dan sumber daya manusia dibandingkan daerah yang kurang di karuniai sumber daya alam.
5. Situasi Demografi: Ketimpangan ekonomi regional di Indonesia Terjadi akibat perbedaan situasi demografi, termasuk Populasi dan laju pertumbuhan penduduk, kesehatan, pendidikan serta etos kerja.

Upah minimum sangat penting bagi pasar kerja mengalami perubahan karena menyebabkan peningkatan dalam biaya tenaga kerja yang mengurangi permintaan tenaga kerja dan memaksa beberapa pekerja memilih kehilangan pekerjaan. Apabila pekerja dibayar dengan upah yang lebih tinggi, sehingga lebih mampu membayar biaya hidup lebih baik. Ketika upah didistribusikan secara lebih merata di antara para pekerja, ketimpangan distribusi pendapatan sosial dapat diminimalkan, yang pada gilirannya mengurangi ketimpangan di tingkat lokal, negara bagian, dan nasional (Mankiw, 2006; Lestari, 2023). Menurut penelitian (González 2023), pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan peningkatan ketimpangan upah dan pendapatan di sektor industri. Dan ternyata koefisien distribusi pendapatan lemah meskipun terjadi perubahan kelembagaan. Pasokan tenaga kerja melebihi permintaan pekerjaan. Hal ini mempengaruhi kemauan pekerja yang rentan untuk menerima upah di bawah rata-rata.

Berdasarkan data upah minimum kabupaten/kota di Jawa Timur untuk tahun 2019-2023, terlihat adanya variasi yang signifikan antar daerah dan tren kenaikan yang konsisten setiap tahunnya. Kota Surabaya secara konsisten memimpin dengan upah minimum tertinggi, mencapai Rp 4.525.479,19 di tahun 2023, diikuti oleh upah minimum Kabupaten Sidoarjo serta Gresik yang diatas Rp 4 juta. Sementara itu, sebagian besar kabupaten di Jawa Timur memiliki upah minimum di bawah Rp 3 juta, dengan beberapa daerah seperti Kabupaten Pacitan, Trenggalek, dan Situbondo yang konsisten berada di kisaran terendah. Pola ini menunjukkan bahwa daerah perkotaan dan kawasan industri cenderung memiliki standar upah yang lebih tinggi dibandingkan daerah kabupaten yang lebih rural.

Penurunan upah minimum di Jawa Timur pada tahun 2019 disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kondisi ekonomi yang tidak stabil. Terdapat kenaikan signifikan pada tahun 2020 dan seterusnya; oleh karena itu, pemerintah lebih berhati-hati dalam menetapkan upah minimum pada tahun 2019. Pertumbuhan penduduk menyebabkan ketat persaingan kerja dan meningkatnya ketimpangan. Ketimpangan distribusi pendapatan menyebabkan distribusi kesejahteraan yang tidak merata di antara penduduk Jawa Timur. Tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya produktivitas juga menjadi alasan penurunan tersebut. Kesenjangan upah yang besar mengindikasikan perlunya upaya pemerataan ekonomi dan kebijakan pengupahan yang lebih merata di seluruh Jawa Timur.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara desentralisasi fiskal, pdrb, dan upah minimum terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Misalnya, penelitian (Hao et al. 2020) yang dilakukan menunjukkan kenaikan desentralisasi fiskal tidak selalu berdampak negatif pada ketimpangan distribusi pendapatan di china, tetapi menyalurkan wewenang kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan sumber daya daerah sendiri dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Studi lain oleh (Aditya 2020) menyatakan bahwa kenaikan desentralisasi fiskal cenderung tidak berdampak terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di indonesia, terutama adanya perbedaan karakteristik dan efektivitas implementasi desentralisasi fiskal antara daerah maju dan tertinggal. sementara riset oleh (Ningtiyas and Dwiputri 2021) menunjukkan jika dampak pdrb terhadap ketimpangan distribusi pendapatan menunjukkan hubungan positif di Indonesia pada sektor industri dibandingkan sektor pertanian

yang lambat. Penelitian yang dilakukan oleh (Sotomayor 2021) menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan di Brazil, tetapi instrumen kebijakan membutuhkan penguatan berkelanjutan.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai unsur-unsur yang berdampak pada ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan menjadi persoalan genting yang dapat mengancam stabilitas sosial dan ekonomi jika tidak ditangani dengan baik. Fenomena ini berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial dan mengganggu keseimbangan perekonomian secara keseluruhan. Mengingat pentingnya isu ini, khususnya dalam konteks otonomi daerah. Latar belakang ini membuat peneliti yakin bahwa perlu dilakukan penelitian tambahan untuk melakukan penyelidikan yang lebih mendalam. yang berjudul "Analisis Keterkaitan Desentralisasi Fiskal, PDRB, dan Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Jawa Timur 2009-2023". Sementara itu, penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber bagi akademisi dan praktisi untuk memahami hubungan yang kompleks antara variabel-variabel di Jawa Timur. Oleh karena itu, studi ini bukan sekedar menyajikan pengetahuan ilmiah, namun juga mengandung implikasi praktis bagi pengembangan kebijakan pasar tenaga kerja yang lebih efektif dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat hubungan antara Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah terdapat hubungan antara Pendapatan Domestik Regional Bruto terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah terdapat hubungan antara Upah Minimum terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis hubungan Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengkaji hubungan Pendapatan Domestik Regional Bruto terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk menganalisis hubungan Upah Minimum terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Timur diukur melalui variabel, Desentralisasi Fiskal, Pendapatan Domestik Regional Bruto dan upah minimum sebagai variabel independen terhadap ketimpangan distribusi pendapatan sebagai variabel dependen melalui pertumbuhan ekonomi dari tahun 2009-2023.

1.5 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah diuraikan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam masukkan serta sumber rujukan ilmiah sebagai pembanding bagi penelitian selanjutnya terkait masalah Desentralisasi Fiskal, Pendapatan Domestik Regional Bruto, Upah Minimum serta Ketimpangan Distribusi Pendapatan.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang komprehensif terkait informasi yang berguna bagi pemerintah (pemangku kepentingan) dan pemerintah daerah serta instansi terkait, dalam memahami berbagai faktor untuk mengatasi ketidakmerataan pembangunan daerah, mengambil keputusan yang tepat, dan mengelola keuangan guna mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan.

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat mampu memperkaya pengetahuan dan analisis terkait kesenjangan pembangunan regional di Provinsi Jawa Timur.